

KEBIJAKAN PEMBEBASAN TARIF PAJAK EKSPOR CPO DAN TURUNANNYA

13

Sony Hendra Permana

Abstrak

Pemerintah menerbitkan PMK No. 115/2022 yang memberikan kebebasan tarif pajak ekspor produk sawit dan turunannya. Kebijakan ini bertujuan untuk optimalisasi perdagangan CPO, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas produksi dan harga. Kebijakan ini langsung direspons dengan kenaikan harga TBS dan respons positif emiten sektor perkebunan. Artikel ini membahas kinerja perdagangan CPO dan tantangan kebijakan pembebasan tarif pajak ekspor sawit. Saat ini ekspor sawit menyumbang lebih dari separuh surplus neraca perdagangan pada Juni 2022. Namun ada tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan tarif yakni kendala negosiasi ulang kontrak dan terbatasnya ketersediaan pengangkutan, masih berlakunya kebijakan DMO sehingga stok dalam negeri melimpah, serta tren penurunan harga CPO global. Pemerintah perlu mempertimbangkan perpanjangan relaksasi, penghapusan kebijakan DMO, mendorong konsumsi CPO dalam negeri melalui percepatan program B35, B40 dan B50, serta memperbaiki tata kelola industri sawit. Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi dan evaluasi atas kebijakan tersebut.

Pendahuluan

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk mendorong ekspor produk kelapa sawit dan produk turunannya dengan memberikan kebebasan tarif pajak ekspor pada produk tersebut. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 115 tahun 2022 (PMK No.115/2022) yang mulai berlaku tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Langkah ini diambil untuk menormalkan kembali ekspor komoditas produk kelapa sawit

dan turunannya setelah sempat mengalami penurunan akibat adanya larangan ekspor produk tersebut di bulan April lalu. Dalam 1,5 bulan diharapkan adanya percepatan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya, sehingga di tanggal 1 September pemerintah akan menerapkan tarif pajak ekspor yang bersifat progresif untuk produk tersebut (Bisnis Indonesia, 18 Juli 2022).

Berlakunya kebijakan ini direspons positif dengan adanya kenaikan harga tandan buah



segar (TBS) sawit. Berdasarkan data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), pada tanggal mulai berlaku kebijakan tersebut, harga rata-rata TBS petani swadaya di 22 provinsi bergerak naik menembus Rp1.027 per kilogram (kg) dari sebelumnya harga di tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp916 per kg. Selanjutnya di tanggal 16 Juli 2022, harga TBS kembali naik menjadi Rp1.084 per kg (Bisnis Indonesia, 18 Juli 2022). Kebijakan pembebasan tarif pajak ekspor ini juga berdampak positif terhadap prospek emiten di sektor perkebunan. Adanya penghapusan pungutan ekspor akan berimbas pada naiknya harga jual rata-rata atau *average selling price* (ASP) CPO, sehingga kinerja keuangan dan saham emiten perkebunan dapat meningkat selama pemberlakuan kebijakan tersebut (Bisnis Indonesia, 18 Juli 2022).

Sebelumnya komoditas minyak goreng di pasar domestik sempat terbatas dan terjadi peningkatan harga yang sangat tinggi. Hal ini akibat adanya permufakatan jahat terkait ekspor sawit mentah yang melibatkan pejabat di Kementerian Perdagangan dan tiga perwakilan perusahaan minyak goreng yang memanfaatkan tingginya harga CPO global sehingga pengusaha mengekspor CPO tanpa mengindahkan kebutuhan dalam negeri. Hal ini menyebabkan pemerintah menetapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang bertujuan untuk memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng dalam negeri (Bisnis.com, 21 April 2022). Bahkan pemerintah juga sempat melakukan pelarangan ekspor CPO dan turunannya agar

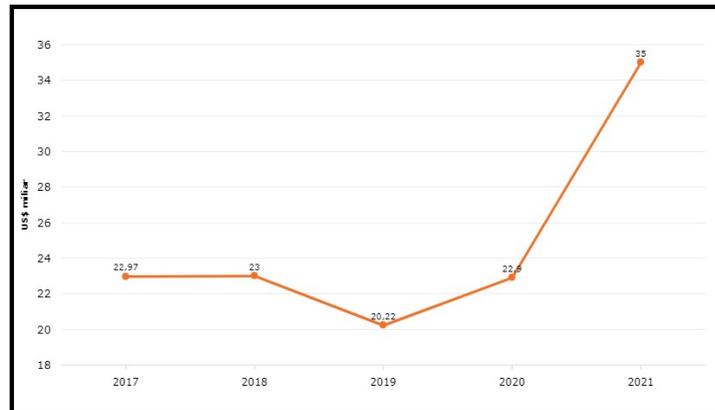
ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri tetap terjaga. Namun kebijakan ini memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap harga TBS.

Upaya mendorong percepatan ekspor ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi tingginya produksi CPO, di mana panen TBS dengan volume yang tinggi diproyeksikan akan mulai terjadi pada Agustus 2022. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk menjaga harga sawit tetap stabil, di mana harga CPO di tingkat petani sempat anjlok hingga bawah Rp1.000/kg. Bahkan di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, harga CPO di tingkat petani mencapai Rp600/kg (gapki.id, 11 Juli 2022). Tulisan ini membahas bagaimana kinerja perdagangan CPO Indonesia dan tantangan dari kebijakan pembebasan tarif pajak ekspor CPO untuk mendorong ekspor CPO Indonesia.

Kinerja Perdagangan CPO Indonesia

Sawit merupakan komoditas ekspor yang sangat diandalkan bagi Indonesia. Hal ini tercermin dari surplus neraca perdagangan nasional pada Juni 2022 sebesar US\$5,09 miliar ditopang lebih dari separuhnya berasal dari ekspor CPO yaitu mencapai 54% atau sebanyak US\$2,74 miliar. Rantai industri pengolahan produk kelapa sawit juga telah menyerap tenaga kerja langsung hingga lebih dari 5,2 juta orang dan menghidupi hingga 20 juta orang (Harian Ekonomi Neraca, 20 Juli 2022).

Adapun nilai ekspor CPO menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 nilai



Gambar 1. Nilai Ekspor CPO 2017 – 2021

Sumber: katadata.co.id, 2022

ekspor CPO tercatat US\$22,97 miliar, meningkat menjadi US\$23 miliar di tahun 2018. Meskipun ekspor CPO sempat mengalami penurunan di tahun 2019 yakni sebesar US\$22 miliar, namun kembali naik pada tahun 2020 ke US\$22,9 miliar. Puncaknya tahun 2021, nilai ekspor CPO mencapai US\$35 miliar (lihat gambar 1). Naiknya nilai ekspor ini berkat harga rata-rata CPO yang tinggi pada 2021 (katadata.co.id, 31 Januari 2022).

Negara yang menjadi tujuan ekspor CPO Indonesia terbesar tahun 2021 adalah China, dengan pangsa ekspor sebesar 20,5%. India dan Pakistan juga merupakan negara tujuan ekspor CPO Indonesia yang cukup besar dengan pangsa ekspor berturut-turut 10,6% dan 8,3%. Negara lain yang juga menjadi tujuan utama ekspor CPO Indonesia adalah Amerika Serikat (6,4%), Malaysia (5,6%), Bangladesh (4,3%), Spanyol (3,4%), Mesir (3,3%), Belanda (2,6%), dan Rusia (2,6%) (Bisnis Indonesia, 18 Juli 2022). Hal ini berarti bahwa ekspor CPO masih memberikan peran cukup besar terhadap kinerja ekspor non-migas.

Tantangan Kebijakan Pembebasan Tarif Pajak Ekspor Sawit

Kebijakan pembebasan tarif pajak ekspor produk kelapa sawit dan turunannya dimaksudkan untuk mendorong ekspor komoditas tersebut yang masih belum optimal semenjak dibukanya kembali persetujuan ekspor pada bulan Mei lalu. Namun demikian, kebijakan ini diperkirakan akan menghadapi tantangan. *Pertama*, kendala teknis pengapalan. Saat ini negosiasi ulang kontrak jual beli yang sempat berhenti akibat adanya larangan ekspor berdampak pada terbatasnya ketersediaan kapal pengangkutan, termasuk proses pengapalannya. Diperkirakan dibutuhkan waktu 2 bulan untuk memulihkan kembali kontrak, termasuk kerja sama pengapalan (Kompas, 20 Juli 2022).

Kedua, masih berlakunya kebijakan DMO. Kebijakan pembebasan tarif pajak produk kelapa sawit dan turunannya belum akan optimal karena kebijakan DMO yang masih diberlakukan sehingga mengakibatkan stok CPO di dalam negeri menjadi sangat melimpah. Saat ini 1.118 pabrik kelapa sawit se-

Indonesia sudah hampir penuh atau berada pada level merah. Pasokan CPO Indonesia pada awal Juli 2022 sebanyak 12,4 juta ton, sementara konsumsi di bulan Juli diperkirakan hanya 1,5 juta ton sehingga stok CPO akan sebesar 10,9 juta ton. Nilai ini tiga kali lipat lebih besar dibandingkan stok dalam kondisi normal yang hanya sebesar 3 sampai 4 jutaan ton per bulan (Tempo.co, 18 Juli 2022).

Ketiga, tren penurunan harga CPO global dalam beberapa bulan terakhir juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam 1 tahun terakhir, harga CPO global tidak pernah menyentuh angka di bawah MYR4.000/ton. Bahkan harga CPO global sempat mencapai harga tertinggi pada bulan Maret dan April 2022, puncaknya pada tanggal 29 April 2022 di mana harga CPO global mencapai MYR7.104/ton. Namun setelahnya harga CPO global mengalami penurunan tajam, dengan titik terendah pada tanggal 15 Juli 2022 dengan harga MYR3.588/ton (lihat gambar 2). Harga CPO kembali mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir, meskipun masih fluktuatif. Sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 harga CPO

diperdagangkan di posisi MYR 3.916/ton (cnbcindonesia.com, 20 Juli 2022).

Dalam jangka pendek, kemungkinan tren *bearish* pada harga CPO masih akan bertahan pada kuartal III tahun 2022. Selain itu, meningkatnya penyebaran Covid-19 di Tiongkok dan ancaman resesi global membuat pertumbuhan ekonomi terbebani, yang sekaligus berdampak pada penurunan daya beli dan permintaan dari negara-negara importir terhadap CPO Indonesia (investor.id, 20 Juli 2022).

Untuk mengoptimalkan kinerja ekspor CPO Indonesia, diperlukan langkah-langkah: *pertama*, memberikan perpanjangan kebijakan pembebasan tarif pajak ekspor CPO. Dengan adanya penambahan waktu relaksasi tersebut dapat memberikan kelonggaran mengatasi masalah administrasi terkait negosiasi ulang kontrak jual beli termasuk kerja sama pengapalannya. *Kedua*, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan DMO di tengah melimpahnya stok CPO dalam negeri. Penghapusan kebijakan DMO juga akan mendorong kenaikan harga di tingkat petani. *Ketiga*, mendorong konsumsi CPO di dalam negeri dengan mempercepat program bauran biodiesel dan bahan bakar jenis solar sebanyak 35%, 40%, dan 50% (B35, B40 dan B50)



Gambar 1. Nilai Ekspor CPO 2017 - 2021

Sumber: katadata.co.id, 2022

yang sebelumnya telah direncanakan di tahun ini. *Keempat*, memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit. Pemerintah harus mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif tentang industri kelapa sawit, sehingga pemerintah dapat menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan desain kebijakan yang tepat dalam pengelolaan industri kelapa sawit demi terciptanya kesejahteraan rakyat, karena sampai saat ini masih banyak rakyat sekitar perkebunan sawit yang menggantungkan hidupnya pada industri sawit.

Penutup

Dalam rangka optimalisasi dan stabilisasi rantai produksi dan perdagangan komoditas CPO, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga stabilitas produksi dan harga TBS di level petani, pemerintah memberikan kebebasan tarif pajak ekspor pada produk sawit dan turunannya yang berlaku mulai tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Kebijakan ini direspons cukup baik oleh pasar di mana harga TBS naik menjadi Rp1.084 per kg dalam 2 hari dari sebelumnya sebesar Rp916 per kg dan di respons positif juga oleh emiten di sektor perkebunan. Adapun kinerja perdagangan CPO Indonesia sangat baik di mana terjadi tren peningkatan nilai ekspor CPO dalam 5 tahun terakhir dengan tujuan utama negara ekspor adalah Cina, India, dan Pakistan.

Tantangan dalam pelonggaran kebijakan ini adalah terdapat kendala pada negosiasi ulang kontrak jual beli dan terbatasnya ketersediaan kapal pengangkutan, masih berlakunya kebijakan DMO sehingga stok dalam negeri sangat melimpah, serta tren penurunan harga CPO

global dalam beberapa bulan terakhir. Untuk itu pemerintah perlu untuk mempertimbangkan kembali adanya perpanjangan relaksasi ini, penghapusan kebijakan DMO, mendorong konsumsi CPO dalam negeri dengan percepatan program B35, B40 dan B50, serta memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dari hulu ke hilir agar nilai tambah industri sawit semakin meningkat ke depan.

Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi dan evaluasi kebijakan pembebasan pajak ekspor produk kelapa sawit dan turunannya. Selain itu juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif agar pelaksanaan kebijakan tersebut efektif mendorong ekspor CPO Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Referensi

- "Angin Segar Emiten Sawit", *Bisnis Indonesia*, 18 Juli 2022, hal. 9.
- "Bos Sawit Agak Lega, CPO Naik 2,73% Setelah Turun 2,79%", 20 Juli 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220720083206-17-356897/bos-sawit-agak-lega-cpo-naik-273-setelah-turun-279>, diakses 21 Juli 2022.
- "Di Balik Kebijakan DMO dan DPO, Awal Mula Dugaan Kongkalikong Ekspor Minyak Sawit", 21 April 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220421/12/1525490/dibalik-kebijakan-dmo-dan-dpo-awal-mula-kasus-dugaan-kongkalikong-ekspor-minyak-sawit>, diakses 25 Juli 2022.
- "Ekspor Perlu Didorong agar Panen Petani Bisa Terserap", *Kompas*, 20 Juli 2022, hal. 10.

"Harga CPO Berguguran Lagi" 20 Juli 2022, <https://investor.id/market-and-corporate/300192/harga-cpo-berguguran-lagi>, diakses 21 Juli 2022.

"Insentif Legit Ekspor Sawit", Bisnis Indonesia, 18 Juli 2022, hal. 1.

"Nilai Ekspor CPO Tembus US\$35 Miliar pada 2021", 31 Januari 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/nilai-ekspor-cpo-tembus-us-35-miliar-pada-2021>, diakses 20 Juli 2022.

"Pungutan Ekspor Sawit Dihapus, Apkasindo Ingin DMO, DPO, dan FO Dicabut Juga", 18 Juli 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1613090/pungutan-ekspor-sawit-dihapus-apkasindo-ingin-dmo-dpo-dan-fo-dicabut-juga>, diakses 21 Juli 2022.

"Tingkatkan Nilai Tambah: Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Terus Didorong", Harian Ekonomi Neraca, 20 Juli 2022, hal. 11.

"600 Perak Per Kilo! Petani Sawit Tunda Panen", 11 Juli 2022, <https://gapki.id/news/21212/600-perak-per-kilo-petani-sawit-tunda-panen>, diakses 21 Juli 2022.



Sony Hendra Permana
sony.permana@dpr.go.id

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E, menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Persada Indonesia YAI pada tahun 2003 dan Pendidikan Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (2019), "Peran Logistik Ekspres bagi Pengembangan Sektor UMKM di Indonesia" (2020), dan "Utilization of the Internet as Media for Marketing SMEs Products" (2021).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.